

**AKSI KOLEKTIF PETANI DALAM KOPERASI UNTUK AGRIBISNIS
BERKELANJUTAN
(Sebuah Tinjauan Literatur)**

Rika Hariance^{1,2}

Corresponding author: rikahariance@gmail.com

ABSTRACT

Social exchange assumes social behavior is an exchange series where individuals always try to maximize the benefits they get and minimize the costs or risks incurred. The social exchange theory is perfected with network theory (social exchange theory), which is that social exchange does not only occur between two people (individuals and individuals), but occurs by involving various parties, agencies, and organizations. This study aims to describe the collective action in agribusiness partnerships that have been carried out by several previous researchers. The method used in this research is a literature study by looking at patterns and symptoms from previous research. This research tries to complete an important part in a cooperative namely collective action as a basis for the establishment of cooperatives.

Keywords: Collective Action, Cooperatives, Agribusiness, Sustainable

ABSTRAK

Pertukaran sosial berasumsi perilaku sosial adalah serangkaian pertukaran dimana individu selalu berusaha untuk memaksimalkan keuntungan yang mereka peroleh dan meminimalkan biaya atau risiko yang dikeluarkan. Teori pertukaran sosial tersebut disempurnakan dengan teori jaringan (*network exchange theory*) yaitu pertukaran sosial tidak hanya terjadi antara dua orang saja (individu dengan individu), melainkan terjadi dengan melibatkan berbagai pihak, instansi, dan organisasi. Tujuan Penelitian ini adalah untuk menggambarkan aksi kolektif dalam kemitraan agribisnis yang sudah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur dengan melihat pola dan gejala dari penelitian sebelumnya. Penelitian ini mencoba untuk mengisi bagian penting dalam koperasi yaitu tindakan kolektif sebagai dasar pendirian koperasi.

Kata Kunci: Aksi Kolektif, Koperasi, Agribisnis, Berkelanjutan

¹ Program Pascasarjana Universitas Andalas, Padang

² Staf Pengajar Fakultas Pertanian Universitas Andalas, Padang

PENDAHULUAN

Pada awalnya konsep agribisnis (Zylbersztajn, 2017) adalah konsep dimana pertanian merupakan bagian dari sebuah bisnis. Dimana petani kecil merupakan bagian dari sistem seperti sebuah korporasi besar, bukanlah bertujuan untuk membuat munculnya konflik antara korporasi besar dengan petani kecil. Tantangan agribisnis (Azahari, 2000) masa depan adalah era keterbukaan yang membuat semakin tingginya tingkat persaingan di sektor pertanian. Maka persaingan pun menjadi semakin sulit. Dengan demikian pendekatan pemberdayaan petani pun dilakukan dengan pendekatan yang melalui *market orientation* (berorientasi pasar) (Castle, 2011; Azahari, 2000; Zylbersztajn, 2017). Untuk mewujudkannya dilakukan melalui kemitraan.

Agar tidak tertinggal dalam persaingan bebas (Riyadi, 2003) maka pembangunan agribisnis dilakukan dengan optimalisasi produksi komoditas unggulan melalui kesatuan agribisnis yang tak terpisahkan. Sehingga dapat menciptakan nilai tambah dan meningkatkan kesejahteraan petani. Untuk itu pembangunan agribisnis membutuhkan koordinasi, sinkronisasi, kerja sama melalui kemitraan antarpelaku agar tujuan mulia tersebut dapat tercapai. Kemitraan tersebut (Castle, 2011) dapat dilakukan dengan kolaborasi antara institusi publik dan individu atau organisasi yang terintegrasi secara terpadu.

Pertanian adalah kegiatan utama masyarakat desa yang diusahakan dalam skala kecil, kurang tangguh dan lemah (Riyadi, 2003).

Diharapkan melalui pembangunan agribisnis yang terpadu, maka pengelolaan sumber daya yang terbatas dapat dilakukan secara optimal, menciptakan lapangan pekerjaan yang produktif, mengurangi disparitas antara desa dan kota serta berdampak juga pada tumbuhnya perekonomian desa yang mandiri dan berkelanjutan. Untuk dapat berkelanjutan (Wunderlich, 2006) yang paling penting untuk diperhatikan adalah adopsi praktik rantai pasokan yang berkelanjutan baik berkelanjutan secara sosial, lingkungan dan ekonomi dari produksi komoditas dan perdagangannya.

REVIEW LITERATUR

Review literatur ini dilakukan dengan tujuan untuk menggambarkan aksi kolektif dalam kemitraan agribisnis yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu. Peninjauan dilakukan melalui bahan-bahan bacaan berupa artikel pada jurnal nasional dan internasional bereputasi, prosiding seminar, dan buku-buku referensi terkait lainnya. Artikel dan prosiding yang direview merupakan artikel dengan rentang waktu dari tahun 2000 hingga 2019.

Adapun kata kunci yang digunakan dalam pencarian literature adalah *New Institutional Economics, Partnership, Agribusiness System, Coffee Business, Sustainable Development, Enterprenuership, Sustainable Coffee Business, Value Chain, Value Creation, Regional Development, Cooperatives and Collective Action*. Dengan membaca sebanyak 400 abstrak dan menelaah lebih lanjut 50 artikel maka dihasilkanlah review literatur ini.

Ekonomi Kelembagaan

Adam Smith sebagai perintis teori ekonomi klasik memahami bahwa campur tangan negara tidak diperlukan dalam urusan ekonomi. Teori ini kemudian berkembang menjadi teori ekonomi neo klasik dengan ilmuwan terkenal adalah Paul Samuelson dengan buku yang berjudul "Economics an Introductory Analysis" (Santosa, 2008). Adam Smith dan Samuelson menganggap bahwa kegiatan ekonomi ditentukan oleh mekanisme pasar dengan konsep pasar bebas. Menurutnya muara akhir dari kegiatan ekonomi adalah efisiensi. Mereka yang mampu melaksanakan kegiatan ekonomi dengan efisien, maka akan memenangkan pasar. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa yang efisien akan menang, dan yang tidak efisien akan kalah hingga masyarakat secara keseluruhan akan mencapai kondisi kesejahteraan bersama yang optimal.

Booke mengatakan bahwa teori klasik dan neo klasik tersebut tidak cocok untuk negara berkembang, selanjutnya Gunnar Myrdal dalam teorinya menyatakan bahwa negara berkembang memiliki keterbelakangan yang berbeda dengan negara maju, sehingga memerlukan sebuah konsep kelembagaan dalam ekonomi sebagai suatu kesatuan ilmu sosial, psikologi, sosiologi, politik, antropologi, sejarah dan hukum (Santosa, 2008).

Konsep ekonomi kelembagaan terdiri atas tiga bagian yaitu : *Old Institution Economics*, *Quasi Economics* dan *New Institutional Economics*. *Old Institutional Economics* (Transaksi klasik), Jhon

R. Commons (1826 –1945) fungsi pertukaran pasar adalah fungsi pengalihan hak milik kekayaan, transaksi kepemimpinan dan transaksi distribusi. Kegiatan ekonomi dilakukan dengan aturan-aturan yang disepakati bersama, yaitu berupa kebiasaan, adat, hukum dan kejiwaan. Kemajuan individu dalam suatu kelompok akan membebaskan individu tersebut dari tekanan dan diskriminasi, oleh karena itu dibutuhkan campur tangan pemerintah untuk regulasi.

Hal ini sejalan dengan Hobson Theory bahwa teori ekonomi klasik tidak dapat menyelesaikan masalah tercapainya kondisi ekonomi *full employment, in equality* (kesenjangan ekonomi), dan pasar bukanlah ukuran terbaik untuk ongkos sosial. Maka diperlukan etika yang mengatur ekonomi positif dan normative.

New Institutional Economics (NIE) memandang ekonomi adalah tentang mencapai efisiensi maksimum dan meminimumkan biaya menyeluruh, tidak hanya biaya produksi saja tetapi termasuk di dalamnya biaya transaksi. Secara makro NIE memandang bahwa ekonomi adalah sebuah lingkungan kelembagaan yang memiliki aturan politik, sosial dan legal tentang kepemilikan, pemilihan dan hak-hak dalam kontrak. Selanjutnya secara mikro NIE memandang perlunya *Institutional Arrangement* (Kesepakatan Kelembagaan) yang mengatur tata kelola kelembagaan (*Institutional Governance*).



Gambar 1. *New Institutional Economics*

Relasi Dalam Konsep Ekonomi Kelembagaan

Dalam ilmu ekonomi kita selalu dihadapkan pertama kali dengan ilmu makro, mikro ekonomi dan pengantar bisnis dengan konteks ilmu bagaimana konsumen memaksimalkan kegunaan barang dan bagaimana produsen mengatur dan memaksimalkan profit. Termasuk juga bagaimana mendistribusikan/membuat para *stakeholders* mengetahui profit yang telah diperoleh (Spithoven, 2014).

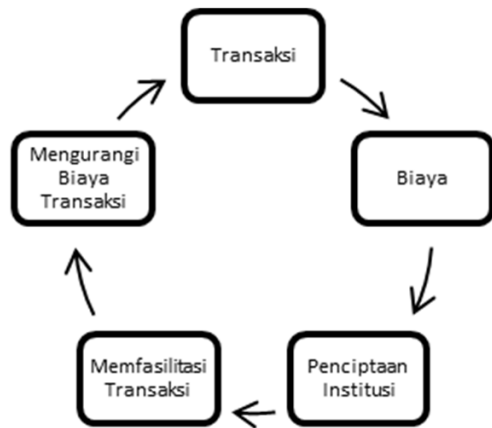
Pada prinsipnya ilmu ekonomi berfokus pada bagaimana menjalankan bisnis sebagai sebuah siklus yang ideal dijalankan oleh kebanyakan orang didunia. Dimana, manejer bekerja bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang maksimum dengan mengalokasikan sumberdaya yang dimiliki. Dalam hal ini, mereka menganggap bahwa konsumen juga kaya dan tahu dimana akan memperoleh produk yang berkualitas dengan harga tinggi. Namun pada kenyataannya konsumen lebih banyak berada pada posisi rasionalitas harga. Dimana mereka menerima informasi harga dan memposisikan diri pada struktur pasar yang tepat. Dalam ilmu ekonomi tidak ada perhatian terhadap bagaimana transaksi dilakukan, dan biaya apa yang

terlibat didalamnya. Transaksi inilah yang kemudian dibahas dalam ekonomi kelembagaan (Spithoven, 2014).

Dalam ekonomi kelembagaan dipelajari bahwa (Spithoven, 2014):

1. Koordinasi ada hubungannya dengan biaya transaksi dan bagaimana institusi dapat mengurangi biaya tersebut. Setiap transaksi akan mendatangkan biaya, maka penciptaan dan evolusi institusi akan memfasilitasi transaksi untuk menghasilkan biaya yang lebih murah.
2. Walaupun institusi berhasil meningkatkan efisiensi bukan berarti dia dapat berhasil, karena ada faktor kepentingan pribadi yang mempengaruhi. Karena setiap orang berusaha mengendalikan institusi karena memperoleh manfaat pribadi (*Free Rider*). Hal ini mengakibatkan lembaga gagal memfasilitasi transaksi yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas.
3. Institusi gagal/tidak efektif ketika individu menunjukkan perilaku *opportunistic* dan sukses menghindari aturan.
4. Mencoba merubah institusi dari waktu ke waktu.
5. Institusi dapat ditegakkan dengan secara sukarela atau terpaksa.

Dari penjelasan diatas maka hubungan (relasi) dalam ekonomi kelembagaan dapat digambarkan seperti gambar dibawah ini:



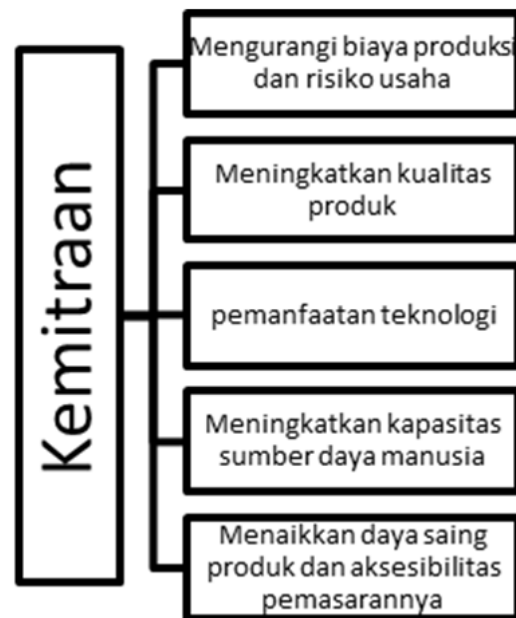
Gambar 2. Peran institusi (lembaga) dalam transaksi ekonomi (Spithoven, 2014)

Membangun Kemitraan Sebagai Relasi Dalam Ekonomi Kelembagaan

Konsep pertukaran sosial (Amal, 2010) bahwa pertukaran sosial berasumsi perilaku sosial adalah serangkaian pertukaran dimana individu selalu berusaha untuk memaksimalkan keuntungan yang mereka peroleh dan meminimalkan biaya atau resiko yang dikeluarkan. Erdward Emerson dalam (Amal, 2010) menyempurnakan teori pertukaran sosial tersebut dengan teori jaringan (*network exchange theory*) yaitu pertukaran sosial tidak hanya terjadi antara dua orang saja (individu dengan individu), melainkan terjadi dengan melibatkan berbagai pihak, instansi, dan organisasi.

Kemitraan yang kuat akan menciptakan produk dan memberikan pelayanan yang lebih baik melalui kolaborasi antarperusahaan. Fokus dari kemitraan adalah menciptakan manfaat, inovasi, berbagi hasil penelitian dan meningkatkan penciptaan nilai tambah produk (Agrawal, 2003; Ghouri et al.,

2019). Adapun tujuan terbentuknya kemitraan (Wunderlich, 2006) adalah untuk mengurangi biaya produksi dan risiko usaha, meningkatkan kualitas produk, pemanfaatan teknologi dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia serta menaikkan daya saing produk dan akses pemasarannya.



Gambar 3. Tujuan Kemitraan (Wunderlich, 2006)

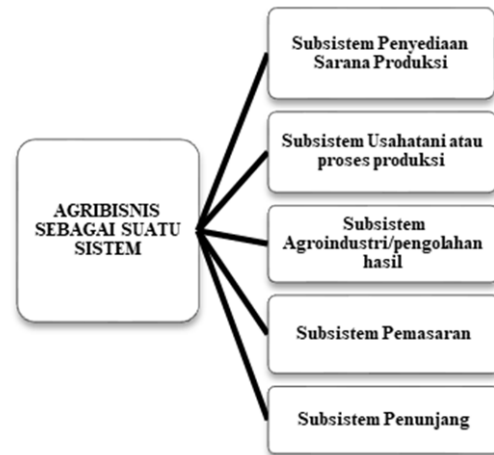
Pembangunan Agribisnis

Membangun agribisnis tidak terlepas dari membangun pertanian. Pembangunan yang memberi prioritas tinggi pada sektor pertanian di masa yang lalu memberi dampak pada jumlah penduduk miskin di daerah desa yang masih terus menurun (Soekartawi, 2003). Membangun pertanian adalah sebuah aktivitas yang kompleks, karena teknologi harus digunakan oleh manusia, digabungkan dengan kecerdasannya, imajinasi dan kerja keras yang terus menerus. Efektif atau tidaknya pembangunan

pertanian tergantung kepada bagaimana setiap aktor yang terlibat di dalamnya bekerjasama (Mosher, 1991).

Di beberapa negara pembangunan pertanian terus dilakukan hingga mampu memproduksi lebih banyak dengan penggunaan faktor produksi dan teknologi yang lebih modern melalui investasi puluhan tahun mencapai kondisi pertanian. Pertanian dilakukan di lahan yang lebih sedikit dengan sumber daya yang lebih sedikit dan biaya yang lebih rendah untuk menciptakan kemakmuran yang lebih besar (Gaffney, et al., 2019). Misalnya, Bangladesh tidak dapat mempertahankan kemajuan ekonomi jangka panjangnya tanpa memiliki sektor pertanian yang kuat disertai dengan sub-sektor agribisnis yang dinamis (Ali & Islam, 2011). Agribisnis memainkan peran penting untuk meningkatkan pendapatan yang direalisasikan oleh petani. Agribisnis terbukti memiliki dampak positif pada pendapatan para petani, peningkatan komersialisasi dan pembangunan ekonomi di Bangladesh (Sarma & Raha, 2017).

Agribisnis sebagai sebuah sistem adalah suatu struktur yang terdiri dari subsistem yang saling terkait satu sama lain. Membangun agribisnis merupakan pembangunan industri, jasa dan pertanian yang dilakukan secara sekaligus dan tidak berjalan sendiri-sendiri. Termasuk juga membangun keunggulan kompetitifnya diatas keunggulan komparatif melalui transformasi pembangunan yang digerakkan oleh modal dan inovasi (Hermawan, 2006). Adapun sistem agribisnis tersebut dapat dilihat pada gambar 5 dibawah ini.



Gambar 4. Agribisnis Sebagai Suatu Sistem (Hermawan, 2006)

Untuk membangun agribisnis yang terintegrasi dan terorganisir dengan baik tidak dapat dilakukan sendiri oleh petani. Karena pertanian di negara berkembang rata-rata dikelola oleh petani dengan skala usaha yang kecil (Bush et al., 2019; Easdale & Aguiar, 2018; Eitzinger et al., 2019; Ho et al., 2018; Onyas et al., 2018). Oleh karena itu dibutuhkan kemitraan antar subsistem agar integrasi dapat mewujudkan tujuan efektifitas dan efisiensi guna mencapai keuntungan yang maksimum untuk kesejahteraan masyarakat.

Coffee Sustainability telah berkembang dari sebuah gerakan yang dipimpin oleh masyarakat sipil menjadi kepentingan bisnis inti dari perusahaan perdagangan kopi dan pemanggang. Ini membuat investasi besar dari perusahaan swasta dan industri kopi untuk melaksanakan tindakan kolaboratif. Millard, (2017) menemukan bahwa pendekatan pasar untuk produksi kopi berkelanjutan membutuhkan komitmen paralel dari pemerintah dan lembaga donor untuk mencapai partisipasi sosial yang adil dan konservasi lingkungan.

Boshkoska et al (2019) menemukan dalam penelitiannya tentang *Value Chain* dalam agribisnis pangan. Mereka menyampaikan bahwa rantai nilai dalam agribisnis pangan mewakili serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memberikan produk yang berharga ke pasar. Mereka membuat sebuah *Decision Support System* (DSS) untuk mengevaluasi bagaimana pengetahuan dibagi dan dimobilisasi di antara para aktor dalam rantai nilai tersebut. DSS yang diusulkan adalah: (1) identifikasi batas pengetahuan yang paling umum dengan menggunakan pembelajaran mesin dan teknologi ontologi, (2) transformasi ontologi yang diperoleh menjadi DSS untuk evaluasi batas pengetahuan yang ada.

Kemitraan Agribisnis Berkelanjutan

Membangun kemitraan dalam agribisnis sudah menjadi aktivitas yang banyak dilakukan, hal ini adalah sebagai upaya untuk membangun rantai pasokan yang cukup bagi konsumen atas barang yang dibutuhkan dan mensejahterakan petani dengan terjaminnya harga dan pemasaran. Telah banyak upaya kemitraan dalam agribisnis yang dilakukan (Darwis; Indraningsih, Dan, & Friyatno, Purnaningsih, 2007; Purnaningsih & Sugihen, 2008; Rochdiani & Suranta, 2007; Supriatna & Dradjat, 2005), namun kemitraan tersebut tidak menunjukkan penambahan pendapatan yang signifikan ditingkat petani karena keterlibatan petani dalam kemitraan hanya sampai pada panen dilaksanakan.

Kemudian *The United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) and the International Institute for Sustainable Development (IISD)* meluncurkan sebuah program yang disebut dengan *Sustainable Commodity Initiative* (SCI) Pada Desember 2002 di Jakarta. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan keberlanjutan sosial, lingkungan dan ekonomi dari produksi komoditas dan perdagangannya dengan mengembangkan strategi multipihak secara global berdasarkan sektor per sektor. Kemitraan bermakna mempromosikan adopsi praktik rantai pasokan berkelanjutan seperti yang diidentifikasi oleh beragam inisiatif yang ada. Pendekatan yang diketahui paling tepat adalah inisiatif yang didasarkan pada pendekatan paralel yang dapat diintegrasikan ke dalam, melayani, dan memiliki strategi generik untuk setiap sektor (Wunderlich, 2006).

Aksi kolektif dapat dilakukan dalam bentuk organisasi kelompok tani, koperasi ataupun aksi non-organisasi dalam bentuk interaksi antara petani dengan pedagang pengumpul. Aksi kolektif dilakukan dalam tujuannya untuk mendapatkan: jaminan pasar, mengurangi biaya transaksi, mendapatkan kredit dan mempermudah akses ke faktor produksi berupa benih, pupuk dan pestisida.

Dalam aksi kolektif, kemitraan adalah faktor kunci yang memiliki peran utama yang dapat menghubungkan antara petani dengan pasar. Dengan demikian dapat meningkatkan permintaan terhadap produk. Sehingga secara

sistemik semua yang ada di dalam sistem bergerak untuk memenuhi permintaan tersebut dan menjamin kualitas produk agar sesuai dengan permintaan pasar.

Aksi Kolektif Petani

Aksi kolektif adalah tindakan yang dilakukan secara bersama untuk mencapai tujuan bersama, namun dalam aksi kolektif sendiri pun terdapat sebuah masalah yang disebut dengan *Free Rider*, seperti yang diungkapkan oleh Olson (2014) dalam bukunya *The Logic of Collective Action*". Karena aktor yang rasional tidak akan terlibat dalam aksi kolektif jika mereka dapat mengambil manfaat tanpa berpartisipasi. Karena setiap orang adalah rasional, dan selalu mempertimbangkan biaya dan manfaat yang mungkin timbul dari setiap aksi yang akan mereka lakukan. Dalam tulisannya Schiffman & Dedekorkut, (2013) menuliskan keputusan individual dari seseorang dalam persaingan di pasar secara bebas justru menimbulkan masalah eksternalitas. Hal ini disebabkan karena terjadinya kegagalan pasar akibat dari kurangnya aksi kolektif.

Dalam artikelnya York & Neil, (2013) menemukan bahwa dari penelitian yang dilakukannya kepada 25 perusahaan energi terbarukan, mereka mengembangkan model aksi kolektif kewirausahaan. Dalam model tersebut dinyatakan bahwa para pengusaha dapat memberikan solusi atas barang publik dengan melakukan peningkatan identitas peran yang menonjol, menciptakan insentif untuk mendorong kerja sama dan memberikan ruang bagi pemangku kepentingan untuk memungkinkan insentif selektif muncul atas dasar keterlibatan masing-masing peran. Hal ini sejalan dengan artikel

yang ditulis oleh Sciffman diatas, bahwa individu bersifat rasional, untuk mengatasi adanya pemanfaat bebas, maka diperlukan insentif yang diberikan sesuai peran yang dilakukan.

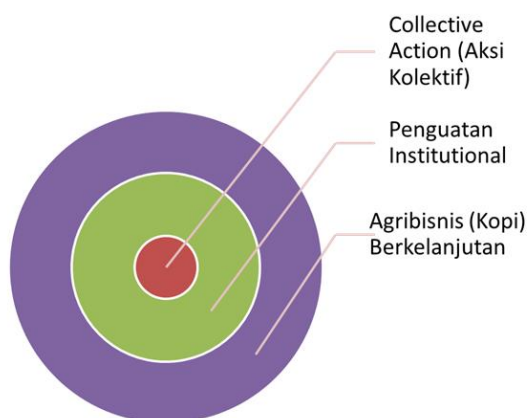
Kemudian Orsi et all (2017) Dalam artikelnya menuliskan tentang efektifitas tindakan kolektif petani dalam meningkatkan kuantitas produksi, kualitas produksi dan keuntungannya. Ketika terdapat sebuah proyek yang dilaksanakan oleh institusi pemerintah maupun non pemerintah bersama asosiasi petani. Hasil penelitan mereka menemukan bahwa peran asosiasi dengan menyediakan media pembelajaran, produksi dan dukungan jaringan dalam mewujudkan peningkatan kinerja petani dinilai kecil. Sementara itu, dari wawancara yang dilakukannya dengan aktor yang berada dalam rantai nilai dan 97 orang petani wijen di Chad Timur ditemukan hasil bahwa, rantai produksi wijen dan kacang dari produksi hingga pemasaran yang dipimpin oleh pemerintah menunjukkan hasil secara efektif dapat meningkatkan kinerja pasar petani.

Dari hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa aksi kolektif yang dilakukan oleh petani dalam bentuk asosiasi belum mampu meningkatkan kinerja produksi, kualitas produksi dan keuntungan mereka, namun jika aksi tersebut kemudian mulai melibatkan pemerintah, bahkan dipimpin oleh pemerintah, justru malah menunjukkan kinerja yang lebih baik.

Namun berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fu & Li (2019), mereka menemukan bahwa untuk mempertahankan jaringan intersektoral dari perusahaan yang bekerja sama, maka akan lebih baik bekerjasama dengan mitra yang berasal dari organisasi non pemerintah.

Dari buku *The Logic Of Collective Action* Olson (2014) ini kita dapat memahami bahwa dalam tindakan aksi kolektif kelompok dapat efektif dan memberikan insentif sosial ke dalam anggota kelompok. Selain itu dengan aksi bersama diharapkan mereka dapat menyuarkan hak-hak yang mereka harus dapatkan sehingga memiliki posisi tawar karena kekuatan yang mereka miliki. Maka dengan demikian mereka secara bersama akan memiliki kemampuan untuk lobi dan negosiasi. Selain itu menurut Olson masih dibutuhkan juga intervensi pemerintah dalam hal regulasi.

Maka dengan demikian hipotesisnya adalah : “Jika aksi kolektif dan penguatan institutional sistem agribisnis dilakukan dengan tepat, maka agribisnis dapat dilakukan secara berkelanjutan dan kuat”(gambar 5).



Gambar 5. Hipotesis Riset

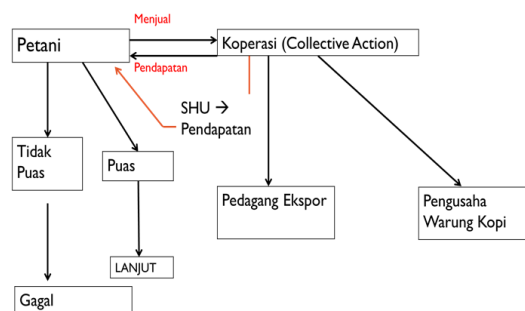
Aksi Kolektif Petani Dalam Bentuk Koperasi

Muhammad Hatta dengan pemikiran ekonomi kerakyatannya dengan jelas menempatkan bahwa untuk membuat ekonomi rakyat dapat memiliki posisi tawar yang kokoh adalah dengan melakukan transformasi sosial dan transformasi ekonomi (Sritua,

2002). Posisi tawar yang kokoh ini adalah dalam rangka hubungan ekonomi rakyat dengan para pelaku ekonomi modern.

Kedua aspek tersebut merupakan dua hal yang harus ada dalam ekonomi kerakyatan. Menurut Hatta, kedaulatan negara didasarkan pada kedaulatan rakyatnya. Maka oleh karena itu untuk membangun ekonomi kerakyatan institusi yang tepat adalah koperasi.

Beberapa negara telah membuktikan bahwa organisasi koperasi telah melakukan peran besar dalam perekonomiannya seperti China, Amerika Latin, Eropa Timur, Slovenia, Brazil, Colombia, Costa Rica, Guatemala, and Mexico (Bontems et all, 1988). Pada koperasi ketika tidak ada ketimpangan pendapatan, para anggota yang kuat adalah agen yang paling efisien dan akan melakukan hal terbaik untuk koperasi dan keadilan akan membatasi aturan distribusi. Koperasi dapat dijadikan sebagai mesin pembangunan pedesaan, dimana dalam konteks pembangunan pedesaan pertanian kecil adalah sangat penting. Dalam rangka mengamankan kelangsungan hidup dan kemandirian produsen kecil, untuk menjadi bagian dari jaringan rantai pasokan berbasis koperasi yang lebih besar. Dengan demikian koperasi dipandang sebagai entitas ekonomi yang produktif dan kompetitif di bidang pertanian terutama terkait dengan investasi di tingkat pedesaan.



Gambar 6. Koperasi Petani sebagai entitas ekonomi produktif bagi petani

Tujuan dibentuknya koperasi adalah agar usaha yang dilaksanakan bersama dapat mendatangkan keuntungan bagi seluruh anggota yang terlibat dalam koperasi dengan menerapkan prinsip-prinsip koperasi yang ada. Keuntungan yang diperoleh anggota petani yang tergabung dalam koperasi adalah pendapatan dari usahatani dan pendapatan dari Sisa Hasil Usaha Koperasi. Karena, anggota adalah sebagai pengambil keputusan tertinggi melalui rapat anggota tahunan maka peningkatan keuntungan adalah salah satu alasan untuk tergabung dalam koperasi. Sebagai salah satu subsistem utama dalam rantai pasokan agribisnis, petani sebagai anggota seharusnya memiliki posisi tawar yang cukup tinggi, karena bersifat sebagai penyedia *supply* untuk memenuhi permintaan pasar (yang terhubung dengan koperasi berupa eksportir maupun industri pengolah). Namun, dalam penetapan harga posisi petani tetap saja hanya sebagai penerima harga, tidak memiliki kekuatan tawar, sehingga harga yang diterima petani cenderung bersifat tetap. Dalam konsep pertukaran hal ini disebut dengan reward yang bersifat tetap, reward yang bersifat tetap akan mengakibatkan kecenderungan terhadap interaksi individu juga mengalami penurunan karena kepuasan yang menurun, maka hal ini akan dapat menyebabkan kegagalan.

Koperasi sudah bukan lagi kajian baru dalam ekonomi kerakyatan, karena kajian terkait dengan koperasi juga telah banyak dilakukan oleh para peneliti dan akademisi sebelumnya (Avsec & Štromajer, 2015; Benson, 2014; Borda-Rodriguez & Vicari, 2014; Bouzouita et al., 2017; Galor, 2014; Gong & Zhang, 2014; Gupta, 2014; Heras-Saizarbitoria

& Basterretxea, 2016; Juga & Juntunen, 2018; Karhu, 2015; Ndiege et al., 2014; Puusa et al., 2016; Taniguchi et al., 2014; Wittman et al., 2017) bahkan bagi Negara Indonesia Koperasi adalah Sokoguru Perekonomian, tetapi Koperasi sendiri belum menjadi entitas ekonomi penting dalam kehidupan ekonomi rakyat. Ada kesan, bahwa koperasi tidak mampu berjalan dengan baik, hilangnya kepercayaan dan loyalitas serta adanya *Free Rider* menjadi masalah penting dalam Koperasi. Pertanyaannya adalah “Apakah koperasi yang ada memang dibentuk berdasarkan keinginan dan aksi bersama dari para anggotanya?”. Jika memang dibentuk melalui aksi bersama lalu Kenapa Koperasi belum dapat menjadi entitas penggerak ekonomi negara sebagai kedaulatan rakyat Seperti cita-cita mulia Bung Hatta.

DAFTAR PUSTAKA

- Agrawal, A. (2003). Sustainable Governance of Common-Pool Resources: Context, Methods, and Politics. *Annual Review of Anthropology*, 32(1), 243–262. <https://doi.org/10.1146/annurev.anthro.32.061002.093112>.
- Ali, M. M., & Islam, A. M. (2011). *Developing Agribusiness Strategies for Bangladesh - An Analysis*.
- Avsec, F., & Štromajer, J. (2015). Development and socioeconomic environment of cooperatives in Slovenia. *Journal of Co-Operative Organization and Management*, 3(1), 40–48. <https://doi.org/10.1016/j.jcom.2015.02.004>.

- Azahari, A. (2000). Kemitraan Agribisnis Tiga Tungku. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Indonesia*, 15(2), 186–200.
- Benson, T. (2014). Building good management practices in Ethiopian agricultural cooperatives through regular financial audits. *Journal of Co-Operative Organization and Management*, 2(2), 72–82. <https://doi.org/10.1016/j.jcom.2014.10.001>.
- Bontems, P., & Fulton, M. (2009). Organizational structure, redistribution and the endogeneity of cost: Cooperatives, investor-owned firms and the cost of procurement. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 72(1), 322–343. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jebo.2007.05.006>.
- Borda-Rodriguez, A., & Vicari, S. (2014). Rural co-operative resilience: The case of Malawi. *Journal of Co-Operative Organization and Management*, 2(1), 43–52. <https://doi.org/10.1016/j.jcom.2014.03.002>.
- Borda-Rodriguez, A., & Vicari, S. (2014). Rural co-operative resilience: The case of Malawi. *Journal of Co-Operative Organization and Management*, 2(1), 43–52. <https://doi.org/10.1016/j.jcom.2014.03.002>.
- Bouzouita, K., Chaari, W. L., & Tagina, M. (2017). Assessing Organizational Effectiveness of Cooperative Agents. *Procedia Computer Science*, 112, 917–926. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.procs.2017.08.117>.
- Bush, S. R., Belton, B., Little, D. C., & Islam, M. S. (2019). Emerging trends in aquaculture value chain research. *Aquaculture*, 498(April 2018), 428–434. <https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2018.08.077>.
- Darwis, V. (n.d.). *Agribisnis Hortikultura Di Provinsi Sumatera Utara*. 70, 123–134.
- Easdale, M. H., & Aguiar, M. R. (2018). From traditional knowledge to novel adaptations of transhumant pastoralists the in face of new challenges in North Patagonia. *Journal of Rural Studies*, 63(August), 65–73. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2018.09.001>.
- Eitzinger, A., Cock, J., Atzmanstorfer, K., Binder, C. R., Läderach, P., Bonilla-Findji, O., Bartling, M., Mwongera, C., Zurita, L., & Jarvis, A. (2019). GeoFarmer: A monitoring and feedback system for agricultural development projects. *Computers and Electronics in Agriculture*, 158(January), 109–121. <https://doi.org/10.1016/j.compag.2019.01.049>.
- Fu, J. S., & Li, Y. (2019). The institutional antecedent to firms' interorganizational network portfolios: Evidence from China. *Public Relations Review*, April, 101776. <https://doi.org/10.1016/j.pubrev.2019.04.009>.
- Gaffney, J., Challender, M., Califf, K., & Harden, K. (2019). Building

- bridges between agribusiness innovation and smallholder farmers: A review. *Global Food Security*, 20(November 2018), 60–65.
<https://doi.org/10.1016/j.gfs.2018.12.008>.
- Galor, Z. (2014). The cooperative components of the Classic Moshav. *Journal of Co-Operative Organization and Management*, 2(2), 83–91.
<https://doi.org/10.1016/j.jcom.2014.10.002>.
- Ghouri, A. M., Akhtar, P., Shahbaz, M., & Shabbir, H. (2019). Affective organizational commitment in global strategic partnerships: The role of individual-level microfoundations and social change. *Technological Forecasting and Social Change*, 146(August 2018), 320–330.
<https://doi.org/10.1016/j.techfore.2019.05.025>.
- Giuliani, E., Ciravegna, L., Vezzulli, A., & Kilian, B. (2017). Decoupling Standards from Practice: The Impact of In-House Certifications on Coffee Farms' Environmental and Social Conduct. *World Development*, 96, 294–314.
<https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2017.03.013>.
- Gong, L., & Zhang, X. (2014). Study of the Game Theory Analysis and Incentive Mechanism of Inter-organizational Knowledge Sharing in Cooperative R&D. *IERI Procedia*, 10, 266–273.
<https://doi.org/10.1016/j.ieri.2014.09.087>.
- Gupta, C. (2014). The co-operative model as a “living experiment in democracy.” *Journal of Co-Operative Organization and Management*, 2(2), 98–107.
<https://doi.org/10.1016/j.jcom.2014.09.002>.
- Heras-Saizarbitoria, I., & Basterretxea, I. (2016). Do co-ops speak the managerial lingua franca? An analysis of the managerial discourse of Mondragon cooperatives. *Journal of Co-Operative Organization and Management*, 4(1), 13–21.
<https://doi.org/10.1016/j.jcom.2016.02.001>.
- Ho, T. Q., Hoang, V. N., Wilson, C., & Nguyen, T. T. (2018). Eco-efficiency analysis of sustainability-certified coffee production in Vietnam. *Journal of Cleaner Production*, 183, 251–260.
<https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.02.147>.
- Indraningsih, K. S., Dan, A., & Friyatno, S. (n.d.). *Strategi Pengembangan Model Kelembagaan. 1*, 1–18..
- Juga, J., & Juntunen, J. (2018). Antecedents of retail patronage in cooperative retail context. *Journal of Co-Operative Organization and Management*, 6(2), 94–99.
<https://doi.org/10.1016/j.jcom.2018.08.001>.
- Kang, S. (1988). Fair distribution rule in a cooperative enterprise. *Journal of Comparative Economics*, 12(1), 89–92.
[https://doi.org/10.1016/0147-5967\(88\)90038-8](https://doi.org/10.1016/0147-5967(88)90038-8).
- Karhu, S. (2015). The parallels of family business research and cooperative studies. *Journal of*

- Co-Operative Organization and Management*, 3(2), 94–95
<https://doi.org/10.1016/j.jcom.2015.11.004>.
- Millard, E. (2017). Still brewing: Fostering sustainable coffee production. *World Development Perspectives*, 7–8(April), 32–42.
<https://doi.org/10.1016/j.wdp.2017.11.004>.
- Ndiege, B. O., Qin, X., Kazungu, I., & Moshi, J. (2014). The impacts of financial linkage on sustainability of less-formal financial institutions: Experience of savings and credit co-operative societies in Tanzania. *Journal of Co-Operative Organization and Management*, 2(2), 65–71.
<https://doi.org/10.1016/j.jcom.2014.10.003>.
- Olson, M. (2014). The logic of collective action. In *Economist (United Kingdom)* (Vol. 410, Issue 8872).
- Onyas, W. I., McEachern, M. G., & Ryan, A. (2018). Co-constructing sustainability: Agencing sustainable coffee farmers in Uganda. *Journal of Rural Studies*, 61(June 2017), 12–21.
<https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2018.05.006>.
- Orsi, L., De Noni, I., Corsi, S., & Marchisio, L. V. (2017). The role of collective action in leveraging farmers' performances: Lessons from sesame seed farmers' collaboration in eastern Chad. *Journal of Rural Studies*, 51, 93–104.
<https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2017.02.011>.
- Purnaningsih, N. (2007). Strategi Kemitraan Agribisnis Berkelanjutan. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 1(3), 393–416.
<https://doi.org/10.22500/sodality.v1i3.5899>.
- Purnaningsih, N., & Sugihen, B. G. (2008). Manfaat Keterlibatan Petani Dalam Pola Kemitraan Agribisnis Sayuran Di Jawa Barat. *Jurnal Penyuluhan*, 4(2).
<https://doi.org/10.25015/penyuluhan.v4i2.2173>.
- Puusa, A., Hokkila, K., & Varis, A. (2016). Individuality vs. communality-A new dual role of co-operatives? *Journal of Co-Operative Organization and Management*, 4(1), 22–30.
<https://doi.org/10.1016/j.jcom.2016.02.002>.
- Rochdiani, D., & Suranta, K. J. (2007). Pola kemitraan antara petani padi dengan pt. e-farm bisnis indonesia dalam meningkatkan pendapatan petani padi. *Sosiohumaniora*, 9(1), 1–7.
<https://doi.org/10.1590/S1517-83822013005000011>.
- Sarma, P., & Raha, S. (2017). An empirical impact analysis of Agribusiness Development Project of Bangladesh. *Journal of the Bangladesh Agricultural University*, 15(1), 62–72.
<https://doi.org/10.3329/jbau.v15i1.33531>.
- Schiffman, H., & Dedekorkut, A. (2013). Individual Action versus Collective Action. *Green Issues and Debates: An A-to-Z Guide*.

- <https://doi.org/10.4135/9781412975728.n72>.
- Spithoven, A. (2014). *Institutional Economics. An Introduction*. January 2010.
- Sritua, A. (2002). *Keuangan Mengenang Bung Rakyat Bapak Perekonomian*.
- Supriatna, A., & Dradjat, B. (2005). Pola Kemitraan Dalam Peningkatan Efisiensi Pemasaran Kopi Rakyat (Studi Kasus di Kabupaten Malang, Jawa Timur). *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 12, 293–307.
- Taniguchi, E., Thompson, R. G., & Yamada, T. (2014). Recent Trends and Innovations in Modelling City Logistics. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 125, 4–14.
- <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.01.1451>.
- Wittman, H., Dennis, J., & Pritchard, H. (2017). Beyond the market? New agrarianism and cooperative farmland access in North America. *Journal of Rural Studies*, 53, 303–316. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2017.03.007>.
- York, J. G., & Neil, I. O. (2013). *Selective Incentives, Entrepreneurship, and Identity: Toward a Behavioral Theory of Collective Action*. 1–57.
- Zylbersztajn, D. (2017). Agribusiness systems analysis: origin, evolution and research perspectives. *Revista de Administração*, 52(1), 114–117. <https://doi.org/10.1016/j.rausp.2016.10.004>.